



Dokumen Perencanaan Tahunan

# RANCANGAN AWAL

## RENJA BAPPEDALITBANG TA. 2023



# Rancangan awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
(BAPPEDLITBANG)  
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Tahun 2023 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Bappelitbangda tahun 2023 tidak terlepas dari Renstra Bappedalitbang 2021-2026 dan tahun kedua RPJMD 2021-2026. Renja Bappelitbangda ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappelitbangda tahun 2023 mendatang.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, untuk itu saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan, Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Parangin, Agustus 2022

**Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Balangan,**



**H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19610514 198903 1 013**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
D. SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD .....	9
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD .....	25
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD .....	27
D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	34
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	38
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>39</b>
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI .....	39
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA .....	44
C. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47



<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>39</b>
.....	
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

Halaman	Nomor
Tabel 1. Data Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan Bappeda untuk tahun anggaran 2021 .....	11
Tabel 2. Target Indikator Makro Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2021.....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN
- Lampiran 2. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021
- Lampiran 3. REALISASI FISIK & KEUANGAN TA. 2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN BALANGAN
- Lampiran 4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN (Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021)





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( BAPPEDALITBANG )**

Jl. A. Yani Km.4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71662  
Telp. (0526) 2028788 Fax. (0526) 2029504

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR :       TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)**  
**KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang   : a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas : RPJPD; RPJMD; Renstra SKPD; RKPD; dan Renja SKPD;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG), perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan surat;
- Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor     tahun 2021 tentang RPJMD kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23).
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 57 tahun 2017 tentang tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten balangan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 11);

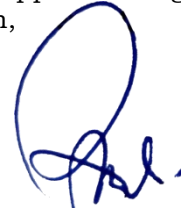


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan;
- KE DUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun RENJA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 secara baik dan tepat waktu.
  2. Mengkonsultasikan hal - hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kepada Tim Penyusun.
  3. Melaporkan Kemajuan dan hasil pekerjaan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KE TIGA : Susunan Tim Penyusun RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KE EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Balangan tahun 2022.
- KE LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Paringin  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_ 2022

Kepala Bappedalitbang Kab.  
Balangan,



**H. Rakhmadi Yusni, S.Sos.M.AP**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19610514 198903 1 013

Lampiran Keputusan Kepala BAPPEDA  
kabupaten Balangan  
Nomor : /SK/Bappeda-BLG/2022  
Tanggal : 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

No.	Nama /NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	<u>Rakhmadi Yusni ,S,Sos.M.AP</u> NIP. 19700514 198903 1 013	Kepala Badan	Ketua
2.	Melda Risda Elfa,SKM, MM NIP. 19841220 200904 2 004	Kasubbag. Perencanaan & Pelaporan	Sekretaris
3.	Hayati,SE NIP. 19810606 201001 2 030	Kasubbag.Keuangan	Anggota
4.	Nanang As'ari, ST NIP.	Kasubbid Perencanaan P2EPD	Anggota
5.	M.Husaini,S.Pt NIP.	Kasubbid Pertanian & Ketahanan Pangan	Anggota
	Dahmila Febrianty,SKM NIP.	Kasubbid Pemerintahan & AParatur	

Ditetapkan di: Paringin  
Pada tanggal : 2022

Kepala Bappeda Kab.  
Balangan,

**Rakhmadi Yusni ,S,Sos.M.AP**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19610514 198903 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDALITBANG)**

Jl. A. Yani Km.4,3 Kel. Batu Piring Kec. Parangin Selatan 71662  
Telp. (0526) 2028788 Fax. (0526) 2029504

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR :           TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)**  
**KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang    :    1. bahwa sesuai dengan Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; Renstra SKPD; RKPD; dan Renja SKPD;
2. bahwa penyusunan Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Bahwa berkenaan dengan maksud pada poin (1) dan (2) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Balangan tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat    :    1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

43);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor tahun 2021 tentang RPJMD kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23).
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022;**

KE SATU : Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan;

KE DUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022;

KE TIGA : Sistematika RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023, meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V : Penutup

KE EMPAT : Dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.;

KE LIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : \_\_\_\_\_ 2022

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Balangan,



**H. Rakhmadi Yusni ,S.Sos.M.AP**

Pembina Tk.I

NIP. 19701207 199503 1 002

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyesuaian program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi



pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Pada tahun 2023 Balitbangda bergabung menjadi satu dengan Bappeda dengan nama Bappelitbangda. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah disingkat Bappelitbangda Kabupaten Balangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Balangan tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Balangan berkiprah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23). Sebagai Lembaga teknis yang berbentuk **Badan Daerah**, Bappelitbangda melaksanakan salah satu tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Bappelitbangda mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.





Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan fungsi tersebut, dapat diuraikan dalam beberapa hal berikut ini :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, Evalausi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi badan ;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 dan mencapai tujuan Renstra Bappelitbangda pada tahun perencanaan, maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
  4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 tahun 2011 tentang RPJMD kabupaten Balangan Tahun 2011 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23).
16. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
17. Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan



Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

2. Mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang Perencanaan pembangunan daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan daerah.

Sedangkan tujuan umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan awal dalam penyusunan dan penetapan kinerja (program dan kegiatan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun anggaran 2023 ;
2. Menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023;
3. Menjadi acuan dokumen referensi dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat lebih terarah, tepat sasaran, berdayaguna dan berhasil guna dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

## B. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi:

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan



#### 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD,**

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD,**

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,**

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu -isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

### **2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok



masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi**, berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran renja**

berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

#### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**

berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2021

### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Balangan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappelitbangda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Balangan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Balangan selama tahun 2021.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

#### a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Penetapan indikator kinerja untuk mengukur sasaran bervariasi, tergantung jenis indikator sarannya. Sedangkan indikator yang digunakan



untuk mengukur kegiatan adalah *input*, *output* dan *outcome*. Kriteria pengukuran yang digunakan adalah target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja tersebut merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Setiap akhir tahun, target kinerja (*performanceplan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performanceresult*), sehingga diketahui celah kinerja (*performancegap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan. Selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performanceimprovement*).

Pada tahun 2023 Bappelitbangda kabupaten Balangan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja tersebut dengan tingkat capaian *outcome*-nya. Pengukuran kinerja Bappelitbangda kabupaten Balangan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kemudian dikategorisasikan pencapaian kerjanya ke dalam empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori
I	Sama dengan atau lebih dari 91%	Sangat Baik
II	81% s/d 90%	Baik
III	60% s/d 80%	Cukup
IV	Kurang dari 60%	Kurang

Apabila terdapat sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

Implementasi rencana strategik Bappelitbangda kabupaten Balangan dalam tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran strategik, rencana kerja dan penetapan kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dikatakan memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD .

Berdasarkan besaran alokasi dana yang dianggarkan untuk Bappedalitbang Kabupaten Balangan tahun anggaran 2021 (setelah perubahan) dalam melaksanakan seluruh program , kegiatan dan subkegiatan serta untuk mencapai sasaran yang diinginkan, mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.**



**7.702.793.118,00** yang terdiri atas **belanja tidak langsung** sebesar **Rp. 1.948.828.478,00** dan **belanja langsung** sebesar **Rp. 5.753.964.640,00**.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat pada tahun 2021 dan terbagi pada **4 (Empat) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 51 (Lima Puluh Satu) Subkegiatan**. Realisasi Keuangan pada tahun 2021 dari *Belanja tidak langsung* dan *Belanja langsung*, Bappedalitbang adalah **Rp. 5.987.684.404,00** atau **77,73%** dengan rincian **Rp. 1.181.858.958,00 (60.64%)** untuk **belanja tidak langsung** dan **Rp. 4.805.825.446,00 (83.52%)** untuk **belanja langsung**. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada *lampiran 2*. Dari pengukuran kinerja pada seluruh program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2021 didapat realisasi fisik kegiatan sebesar **77.73%** dengan kategori **Baik**. Guna melaksanakan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Anggaran Bappedalitbang kabupaten Balangan tahun 2021 menganggarkan **belanja langsung** sebesar **Rp 5.753.964.640,00**. Data Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan Bappedalitbang untuk tahun anggaran 2021 pada tabel 1 berikut :

**Tabel. 1.**

Realisasi Keuangan Program Kegiatan dan Subkegiatan Bappedalitbang Balangan Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.250.687.418</b>	<b>2.326.787.125</b>	<b>71.58%</b>
	<b>a. Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>69.600.000</b>	<b>46.995.000</b>	<b>67.52%</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.250.000	3.875.000	22.46%
	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	33.300.000	26.875.000	80.71%
	3. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.050.000	16.245.000	85.28%
	<b>b. Administrasi Keuangan</b>	<b>1.984.495.118</b>	<b>1.206.996.922</b>	<b>60.82%</b>

<b>Perangkat Daerah</b>				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.948.828.478	1.181.858.958	60.64%
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.116.640	17.487.964	64.49%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.550.000	7.650.000	89.47%
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	
<b>c.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>105.000.000</b>	<b>99.500.000</b>	<b>94.76%</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	105.000.000	99.500.000	94.76%
<b>d.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>339.832.500</b>	<b>308.277.598</b>	<b>90.71%</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.137.500	26.686.000	69.97%
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.650.000	82.429.800	90.93%
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.745.000	45.695.000	81.97%
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	100%
5.	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150.500.000	148.666.798	98.78%

	SKPD			
	<b>e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>283.150.000</b>	<b>275.470.000</b>	<b>97.29%</b>
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.250.000	70.600.000	92.59%
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	206.900.000	204.870.000	99.01%
	<b>f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>272.609.800</b>	<b>210.984.405</b>	<b>77.40%</b>
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.700.000	65.260.805	64.81%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.909.800	155.723.600	90.58%
	<b>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>196.000.000</b>	<b>178.563.200</b>	<b>91.10%</b>
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.000.000	106.397.600	87.21%
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.000.000	70.165.600	94.82%
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>2.054.341.000</b>	<b>1.468.979.905</b>	<b>71.51%</b>
	<b>a. Penyusunan</b>	<b>1.415.825.000</b>	<b>1.244.058.400</b>	<b>87.87%</b>

	<p><b>Perencanaan dan Pendanaan</b></p> <p>1. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuapten/Kota</p> <p><b>b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b></p> <p>1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b></p> <p>1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>1.415.825.000</p> <p><b>472.876.000</b></p> <p>6.600.000</p> <p>466.276.000</p> <p><b>165.640.000</b></p> <p>165.640.000</p>	<p>1.244.058.400</p> <p><b>70.373.600</b></p> <p>6.600.000</p> <p>63.773.600</p> <p><b>164.547.906</b></p> <p>164.547.906</p>	<p>87.87%</p> <p><b>14.88%</b></p> <p>100%</p> <p>13.68%</p> <p><b>99.34%</b></p> <p>99.34%</p>
<b>III</b>	<p><b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b></p> <p><b>a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b></p> <p>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p><b>473.339.900</b></p> <p><b>224.280.000</b></p> <p>24.440.000</p>	<p><b>427.025.174</b></p> <p><b>186.806.874</b></p> <p>23.979.054</p>	<p><b>90.22%</b></p> <p><b>83.29%</b></p> <p>98.11%</p>

	Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)			
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.780.000	13.645.000	92.32%
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33.490.000	31.002.820	92.57%
4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	121.355.000	93.727.000	77.23%
5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.665.000	2.214.000	60.41%
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.550.000	22.239.000	83.76%
	<b>b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>133.200.000</b>	<b>129.159.300</b>	<b>96.97%</b>
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	53.100.000	53.090.000	99.98%

	Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)			
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.200.000	6.090.000	98.23%
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7.300.000	6.990.000	95.75%
4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	43.875.000	42.766.400	97.47%
5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.300.000	12.332.000	86.24%
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.425.000	7.890.900	93.66%
<b>c.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>115.859.900</b>	<b>111.059.000</b>	<b>96.86%</b>
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan	42.410.000	40.429.000	95.33%

	RKPD)			
	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22.709.900	20.260.000	89.21%
	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.740.000	50.370.000	99.27%
IV	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>1.924.424.800</b>	<b>1.764.892.200</b>	<b>91.71%</b>
	<b>a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>324.514.800</b>	<b>175.843.500</b>	<b>54.195</b>
	1. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang usaha milik desa	142.005.000	141.785.000	99.84%
	2. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	148.630.000	6.780.000	4.56%
	3. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	33.879.800	27.278.500	80.52%
	<b>b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>193.630.000</b>	<b>192.922.934</b>	<b>99.63%</b>
	1. Penelitian dan pengembangan pariwisata	193.630.000	192.922.934	99.63%
	<b>c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1.350.780.000</b>	<b>1.345.295.566</b>	<b>99.59%</b>
	1. Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	118.630.000	116.526.000	98.23%
	2. Penelitian dan pengembangan badan			

	Usaha Milik Daerah	406.760.000	405.420.000	99.67%
3.	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	306.760.000	306.335.566	99.86%
4.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	518.630.000	517.014.000	99.68%
<b>d.</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>55.500.000</b>	<b>50.830.300</b>	<b>91.58%</b>
<b>1.</b>	<b>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</b>	<b>55.500.000</b>	<b>50.830.200</b>	<b>91.58%</b>
<b>Total Anggaran</b>		<b>7.702.793.118</b>	<b>5.987.684.404</b>	<b>77,73%</b>

Dari berbagai program ,kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Bappedalitbang pada tahun 2021 dari Belanja tidak langsung dan Belanja langsung, realisasi keuangan Bappedalitbang adalah Rp. 5.987.684.404,- atau 77.73% dengan rincian Rp. 1.181.858.958,00 (60.64%) untuk belanja tidak langsung dan Rp. 4.805.825.446,00 (83.52%) untuk belanja langsung

Jika dilihat dari hasil prosentase realisasi fisik program Kegiatan dan subkegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dari **4** Program, **17** kegiatan dan 51 subkegiatan menunjukkan persentase sebesar **77,73%**. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada *lampiran tabel T.C 29*.

Berdasar data diatas berikut kesimpulan terhadap realisasi keuangan pada program kegiatan dan subkegiatan berdasarkan target yang direncanakan, diantaranya :

**1. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan.**

- a. Kegiatan yang pencapaian kinerja program/kegiatan rata-rata masih di bawah kategori baik (<80%) yaitu :



- subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (22.46 %) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (60.64 %) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (64.49 %) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (69.97 %) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (64.81 %) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- subkegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (13.68 %) pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (77.23 %) pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (60.41 %) pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- subkegiatan Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum (4.56 %) pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan.**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**



- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

**a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

**b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

**c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

**3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

**a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

**b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

**c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

#### **4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

##### **a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

- Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang usaha milik desa
- Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan

##### **b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**

- Penelitian dan pengembangan pariwisata

##### **c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

- Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan
- Penelitian dan pengembangan badan Usaha Milik Daerah
- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

##### **d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

#### **3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Bappeda.**

Pada pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2020, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada.

TABEL . 2.Adapun untuk Realisasi Keuangan Program Kegiatan dan subkegiatan Bappedalitbang Balangan Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 sebagai berikut :



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.250.687.418</b>	<b>2.326.787.125</b>	71.58%
	<b>a. Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>69.600.000</b>	<b>46.995.000</b>	67.52%
	4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.250.000	3.875.000	<b>22.46%</b>
	5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	33.300.000	26.875.000	<b>80.71%</b>
	6. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.050.000	16.245.000	<b>85.28%</b>
	<b>h. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.984.495.118</b>	<b>1.206.996.922</b>	60.82%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.948.828.478	1.181.858.958	<b>60.64%</b>
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.116.640	17.487.964	<b>64.49%</b>
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.550.000	7.650.000	<b>89.47%</b>
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	
	<b>i. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>105.000.000</b>	<b>99.500.000</b>	94.76%
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	-	-	-

	Kelengkapannya			
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	105.000.000	99.500.000	<b>94.76%</b>
<b>j.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>339.832.500</b>	<b>308.277.598</b>	90.71%
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.137.500	26.686.000	<b>69.97%</b>
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.650.000	82.429.800	<b>90.93%</b>
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.745.000	45.695.000	<b>81.97%</b>
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	<b>100%</b>
5.	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.500.000	148.666.798	<b>98.78%</b>
<b>k.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>283.150.000</b>	<b>275.470.000</b>	97.29%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.250.000	70.600.000	<b>92.59%</b>
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	206.900.000	204.870.000	<b>99.01%</b>
<b>l.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>272.609.800</b>	<b>210.984.405</b>	77.40%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.700.000	65.260.805	<b>64.81%</b>
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.909.800	155.723.600	<b>90.58%</b>
<b>m.</b>	<b>Pemeliharaan Barang</b>			

	<b>Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>196.000.000</b>	<b>178.563.200</b>	91.10%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.000.000	106.397.600	<b>87.21%</b>
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.000.000	70.165.600	<b>94.82%</b>
II	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>2.054.341.000</b>	<b>1.468.979.905</b>	71.51%
	<b>d. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.415.825.000</b>	<b>1.244.058.400</b>	87.87%
	2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuapten/Kota	1.415.825.000	1.244.058.400	<b>87.87%</b>
	<b>e. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>472.876.000</b>	<b>70.373.600</b>	14.88%
	3. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.600.000	6.600.000	<b>100%</b>
	4. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	466.276.000	63.773.600	<b>13.68%</b>
	<b>f. Pengendalian, Evaluasi</b>	<b>165.640.000</b>	<b>164.547.906</b>	99.34%



	<b>dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
	2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	165.640.000	164.547.906	<b>99.34%</b>
III	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>473.339.900</b>	<b>427.025.174</b>	90.22%
	<b>d. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>224.280.000</b>	<b>186.806.874</b>	83.29%
	7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	24.440.000	23.979.054	<b>98.11%</b>
	8. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.780.000	13.645.000	<b>92.32%</b>
	9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33.490.000	31.002.820	<b>92.57%</b>
	10. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD,	121.355.000	93.727.000	<b>77.23%</b>

	dan RKPD)			
11.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.665.000	2.214.000	<b>60.41%</b>
12.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.550.000	22.239.000	<b>83.76%</b>
<b>e.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>133.200.000</b>	<b>129.159.300</b>	96.97%
7.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	53.100.000	53.090.000	<b>99.98%</b>
8.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.200.000	6.090.000	<b>98.23%</b>
9.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7.300.000	6.990.000	<b>95.75%</b>
10.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan	43.875.000	42.766.400	<b>97.47%</b>

	RKPD)			
	11. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.300.000	12.332.000	<b>86.24%</b>
	12. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.425.000	7.890.900	<b>93.66%</b>
	<b>f. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>115.859.900</b>	<b>111.059.000</b>	96.86%
	4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	42.410.000	40.429.000	<b>95.33%</b>
	5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22.709.900	20.260.000	<b>89.21%</b>
	6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.740.000	50.370.000	<b>99.27%</b>
<b>IV</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>1.924.424.800</b>	<b>1.764.892.200</b>	91.71%
	<b>e. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>324.514.800</b>	<b>175.843.500</b>	54.195

4.	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang usaha milik desa	142.005.000	141.785.000	<b>99.84%</b>
5.	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	148.630.000	6.780.000	<b>4.56%</b>
6.	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	33.879.800	27.278.500	<b>80.52%</b>
<b>f.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>193.630.000</b>	<b>192.922.934</b>	99.63%
2.	Penelitian dan pengembangan pariwisata	193.630.000	192.922.934	<b>99.63%</b>
<b>g.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1.350.780.000</b>	<b>1.345.295.566</b>	99.59%
5.	Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	118.630.000	116.526.000	<b>98.23%</b>
6.	Penelitian dan pengembangan badan Usaha Milik Daerah	406.760.000	405.420.000	<b>99.67%</b>
7.	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	306.760.000	306.335.566	<b>99.86%</b>
8.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	518.630.000	517.014.000	<b>99.68%</b>
<b>h.</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>55.500.000</b>	<b>50.830.300</b>	91.58%
3.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	55.500.000	50.830.200	<b>91.58%</b>
<b>Total Anggaran</b>		<b>7.702.793.118</b>	<b>5.987.684.404</b>	<b>77,73%</b>

Capaian Kinerja Program Balitbangda:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat	Persentase hasil penelitian	%	76	76	100	



Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemangku Kepentingan	dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kepentingan					Sangat Tinggi
Tingkat Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemangku Kepentingan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kepentingan	%	55	55	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya kebun raya	Persentasi konservasi sumber daya kebun raya	%	30	30	100	Sangat Tinggi

Adapun rincian capaian kinerja atas 3 sasaran program diatas adalah sebagai berikut :

Sasaran pertama **Tingkat Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemangku Kepentingan** dengan indikator sasaran **Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kepentingan** capaian 100% dengan target 76% realisasi 76%, maksud dari capaian disini adalah hasil kelitbangan yang dilaksanakan selama tahun 2021 sudah direalisasikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dinas-dinas yang memang benar-benar mempunyai kepentingan yang terkait dengan hasil penelitian yang ada di badan penelitian dan pengembangan daerah. Adapun hasil kelitbangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan yang mencapai nilai realisasi 76% sebagai berikut :

1. FGD Inventarisasi sekolah Adiwiyata dan workshop internet marketing yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kopersai Kabupaten Balangan;
2. Kajian pembentukan UPTD Kebun Raya Balangan yang dimanfaatkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;

3. Kajian pengembangan pasar rakyat sebagai sumber perekonomian masyarakat Kabupate Balangan yang dimanfaatkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan;
4. Kajian revalensi stanting di Kabupaten Balangan yang dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan;
5. Pemanfaatan dan pengolahan produk pangan alternatif berbasis umbi maya khas Kalimantan Selatan yang dimanfaatkan oleh kelompok tani Kabupaten Balangan;
6. Pembuatan pupuk organik berbentuk granole/pellet di Kabupaten Balangan yang dimanfaatkan oleh kelompok tani Kabupaten Balangan;
7. Pembuatan data monitoring dan evaluasi program penelitian dan pengembangan daerah Bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan;

Sasaran kedua **Tingkat Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemangku Kepentingan** dengan indikator sasaran **Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kepentingan** capaian 100% dengan target 55% realisasi 55%, maksud dari capaian disini adalah hasil kelitbangan yang dilaksanakan selama tahun 2021 sudah direalisasikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dinas-dinas yang memang benar-benar mempunyai kepentingan yang terkait dengan hasil penelitian yang ada di badan penelitian dan pengembangan daerah. Adapun hasil kelitbangan yang mencapai nilai realisasi 55% sebagai berikut :

1. Pengumpulan data Sumber Daya Alam di Kabupaten Balangan;
2. Kegiatan koordinasi pemenuhan data indeks inovasi daerah Tahun 2021 (Sosialisasi dan Workshop);
3. Kajian Studi Kelayakan Kawasan Terpadu Sport Center yang dimanfaatkan oleh Dinas PU dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan;
4. Kajian penelitian angkutan masal yang dimanfaatkan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Balangan;
5. Kegiatan perekayasaan teknologi (pembuatan website sistem informasi inovasi daerah yang dimanfaatkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan

Sasaran ketiga **Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam** dengan indikator sasaran **Persentasi konservasi sumber daya kebun raya** dengan target 30%, realisasi 30%, capaian 100%, maksud dari capaian disini adalah berdirinya kebun raya balangan yang saat ini masih dalam tahap pemenuhan sarana prasaranan dan penataan zona kebun raya.

## 2.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
  - a. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Sedangkan Faktor-faktor penyebab terpenuhi target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam

penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Bappeda kabupaten Balangan sehingga implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Bappeda kabupaten Balangan.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis perencanaan secara umum.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Optimalisasi perencanaan daerah yang mampu menjawab tantangan dan peluang dinamika pembangunan daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas dalam tahapan, tata cara dan penyusunan perencanaan daerah.
2. Strategi Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana serta sarana dan prasarana organisasi dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM Perencana melalui diklat, bimtek.
  - b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana organisasi sesuai kebutuhan .



*Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran tabel T-C 30.*

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan yang terbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18) maka

**1. *Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappedalitbang*** Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

#### **a) Tugas Pokok**

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah membantu bupati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan , Penelitian dan pengembangan daerah.

#### **b) Fungsi**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi badan;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**c) Struktur Organisasi**

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappedalitbang kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
  - Sub Bagian Umum & Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari :
  - Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
  - Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.
4. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terdiri dari :
  - Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
  - Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa
  - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
5. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari
  - Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
  - Sub Bidang Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
6. Bidang Penelitian ,Pengembangan dan Inovasi Daerah terdiri dari
  - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan , Sosial dan Kependudukan.

- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
  - Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappedalitbang Kabupaten Balangan dapat dilihat pada *lampiran4*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu :

1. *Strategic Apex* (Kepala Daerah);
2. *Middle Line* (Sekretaris Daerah);
3. *Operating Core* (Dinas Daerah);
4. *Techno Structure* (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5. *Supporting Staff* (Staf Pendukung).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*), yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang terdiri atas 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan.

Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Bappedalitbang sebagai Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 yang berbunyi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian

dan Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Bappedalitbang atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka semua kebijakan, program dan kegiatan prioritas daerah menjadi tugas dan fungsi Bappedalitbang sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

### **1. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi SKPD.**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten, Bappedalitbang Kabupaten Balangan menghadapi permasalahan dan hambatan pelayanan SKPD sebagai berikut :

1. Masih sedikitnya SDM di bidang perencanaan yang kreatif dan inovatif dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin meningkat.
2. Belum optimalnya implementasi penyusunan dokumen perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan
3. Penetapan indikator kinerja yang masih belum terukur dan tepat sasaran
4. Usulan program kegiatan pembangunan SKPD belum sepenuhnya mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan daerah.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan daerah.

### **2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten, Bappedalitbang Kabupaten Balangan menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi
4. Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Balangan
5. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Dalam RKP Tahun 2023, kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah di satu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I 2021 terkontraksi sebesar 1,25% (yoy). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, kondisi triwulan I tahun ini lebih buruk karena dampak pandemi Covid-19. Dari sisi permintaan hanya Konsumsi Lembaga Non Profit Pelayan Rumah Tangga (LNPR) yang tumbuh positif. Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto masih mengalami kontraksi. Sedangkan dari sisi penawaran 8 dari 17 sektor PDRB tidak terkontraksi di mana dari 5 sektor dominan di Kalimantan Selatan hanya Sektor Industri Pengolahan yang tumbuh positif 0,45%. Sektor dominan lainnya mengalami kontraksi, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian -4,91%, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -1,13%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -1,51% dan Sektor Konstruksi -2,06%.

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan II hingga IV 2021 sangat bergantung pada perkembangan pandemi Covid-19 dan tingkat harga batubara

dipasar global. Pertumbuhan ekonomi triwulan II kemungkinan lebih baik dari triwulan I karena faktor naiknya harga batubara hingga di atas 50%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV diperkirakan tidak sebaik triwulan II akibat kondisi krisis kesehatan yang semakin memburuk pada tingkat nasional. Inflasi pada tahun ini diperkirakan masih rendah sebagai akibat belum pulihnya daya beli masyarakat seperti keadaan sebelum pandemi Covid-19. Tetapi tingkat inflasi pada triwulan II 2021 diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan I dan kemudian tingkat inflasi kembali melambat mengikuti pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Sektor pertambangan masih menjadi sektor andalan Kabupaten Balangan meskipun pada tahun 2021 pertumbuhannya berkontraksi sebesar -3,77%. Pertumbuhan negatif ini menyebabkan menyusutnya nilai distribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan dalam PDRB ADHB pada tahun 2021 menjadi 58,91% dari sebelumnya 60,58% pada tahun 2020. Perbaikan harga batubara di pasar internasional pada triwulan II 2022 dapat mengangkat kondisi perekonomian Kabupaten Balangan. Tetapi tekanan pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 juga diperkirakan terjadi pada triwulan III 2021. Melambungnya harga batubara pada triwulan II 2022 mendorong peningkatan kinerja ekspor batubara Provinsi Kalimantan Selatan periode Januari-Mei 2022 dibandingkan Januari-Mei 2020 sebesar 5,12%. Pada periode April ke Mei 2022 nilai ekspor Kalimantan Selatan meningkat 44,15% menjadi US\$524,60 juta. Sedangkan nilai ekspor karet dan barang dari karet meningkat 47,27% pada periode Januari-Mei 2022 dibanding Januari-Mei 2020 tetapi nilai ekspor bulan Mei menurun 32,56% dibanding April 2022.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2022 diperkirakan masih mengalami tekanan terutama dari pelemahan daya beli masyarakat. Namun jika kenaikan harga batubara masih terjadi hingga triwulan IV 2022 atau setidaknya tidak mengalami penurunan dibanding tingkat harga triwulan II 2022, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan dapat terjadi di angka positif meskipun masih rendah.

Berdasarkan beberapa data tersebut di atas, maka secara umum kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan yang fokus kepada upaya peningkatan kontribusi

PDRB dari sektor pertanian, perdagangan dan sektor tersier lainnya sudah tepat dan dipertahankan dengan target pertumbuhan ekonomi dan besaran kontribusi persektor dapat tercapai. Di sisi lain penanganan pandemi covid 19 juga dapat dilakukan secara optimal dan penanganan secara ekonomi sebagai dampak terhadap covid juga bisa terlaksana secara efektif dan efisien.

**Tabel 2.**

Perubahan Target Indikator Kinerja Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022

Indikator Kinerja		Kondisi Tahun Awal Periode RPJMD
1	Nilai Tukar Petani (%)	105
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4
4	Pertumbuhan Ekonomi	0,50
a	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB(%)	12,50
b	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB (%)	6,00
5	Pertumbuhan Investasi (%)	5,00
6	Pertumbuhan IKM	5,00
7	Tingkat Kemiskinan (%)	5,25
8	Gini Ratio	0,30

Berdasarkan proyeksi kinerja makro daerah pada tahun perencanaan 2023 Bappedalitbang sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, telah menyusun Rencana Kerja Bappelitbangda T.A. 2023 yang berisi 4 (*empat*) program dan 13 (*Tiga Belas*) kegiatan dengan jumlah pagu indikatif Rp. 13.580.470.660,- (*Tiga Belas miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah*). Hasil dari proses penyusunan Renja ini diajukan untuk ditetapkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023. Adapun review terhadap

rancangan awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Balangan disajikan pada *lampiran tabel T-C .31*

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Balangan dalam menyusun program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan, Tokoh masyarakat dan agama, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun juga hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.

Pelaksanaan musrenbang diharapkan agar memberi banyak manfaat dalam mengakomodir usulan-usulan masyarakat. Hasil musrenbang, baik itu tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten hendaknya mendapat porsi perhatian yang besar untuk diakomodir pada renja SKPD dan menjadi bahan penyusun RKPD. Semakin banyak usulan yang diakomodir oleh SKPD berdasarkan skala prioritas dan arah pembangunan diharapkan memacu masyarakat untuk turut aktif menggali, menyusun dan memperjuangkan usulan yang benar-benar bermanfaat langsung dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Bappedalitbang dalam hal ini akan berupaya memperbaiki pelaksanaan musrenbang dan mengawal penyusunan renja SKPD serta memastikan usulan musrenbang masuk dalam RKPD dengan tetap memperhatikan sasaran, arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hasil rumusan aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing masing SKPD sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan bagian dari isu – isu strategis dari SKPD.

## 2.6 ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2022, khususnya bidang ekonomi, SDA, infrastruktur dan kewilayahan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)





tahun 2022 dan Renstra Bappedalitbang tahun 2022. Koordinasi dan sinkronisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawal, menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan guna tercapainya target kinerja pembangunan Daerah di tahun 2022, dan perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing stakeholders guna mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antar pemangku kepentingan (stake holders). Dalam pelaksanaannya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada pengusulan program / kegiatan yang dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa dan disampaikan pada forum di tingkat kecamatan (musrenbang kecamatan). Pada tahapan berikutnya program kegiatan yang menjadi usulan masyarakat (bottom up) dengan program / kegiatan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) atau program / kegiatan legislative yang bersifat teknokratis, politis, dan top down. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD bermanfaat secara langsung kepada masyarakat baik secara social maupun ekonominya.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

##### 1) Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi struktural”** maka Prioritas nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2023, antara lain :

1. Prioritas Nasional 1 Memperkuat katahana ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Prioritas Nasional 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Prioritas Nasional 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Prioritas Nasioanl 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



Tahun 2023 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

#### **(1) Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha**

**Penuntasan krisis kesehatan.** Terkendalanya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

**Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha.** Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri.

**Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga.** Bantuan sosial masih dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

**Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya.** Selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi.



**Program khusus.** Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran *offline*). Selain murid mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal.

### **(2) Diversifikasi Ekonomi**

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

### **(3) Reformasi Struktural**

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada 2022. Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

## **2) Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023**

Rencana pembangunan di tahun 2023, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah merumuskan tema, yaitu: **“Memantapkan Daya Saing Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan”**. Oleh sebab itu, pembangunan di tahun 2023 ini lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan memperkuat



komponen pokok pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi dan daya saing daerah. Program-program yang mendukung Akselerasi dan pencapaian visi pembangunan Kalimantan selatan, yaitu KALSEL MAPAN (mandiri dan terdepan) lebih sejahtera, berkeadilan, berkelanjutan, berdikari dan berdaya saing.

6 prioritas daerah yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut antara lain:

1. Hilirisasi industry , peningkatan sector pertanian dan pariwisata , dengan sasaran meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Pemantapan system ketahanan bencana (Banjir dan Karhutla) Perbaikan Lingkungan Hidup
3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Kawasan Perekonomian
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Terutama Kemudahan dalam Perizinan Berinvestasi
5. Peningkatan SDM Melalui Perkuatan Sistem Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterampilan, dan Penanganan Masalah Sosial
6. Pengembangan Kalsel Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru

### **3) Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026**

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten



Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah “ **Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat Melalui Pengembangan Infrastruktur Desa dan Penataan Kota Paringin Serta Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Terhadap Dampak Pandemi Covid-19** “. Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 6 (enam) Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Paringin, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Pengembangan Infrastruktur Desa
- b. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

2. Prioritas 2 : Peningkatan vaksinasi dan penanganan covid-19, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Optimalisasi peran dan fungsi Satgas Covid Kabupaten Balangan
- b. Peningkatan vaksinasi Covid-19
- c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanggulangan Covid. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat terdampak covid 19

Prioritas 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Revitalisasi dan penataan serta perluasan pasar-pasar tradisional Pasar Modern Adaro, Pasar Halong, Pasar Uren, dan Pasar Mauya;
- b. Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perdagangan karet (buffer stock);
- c. Penyediaan cadangan pangan dan kesiapsiagaan bencana
- ;d. Pengembangan Desa Wisata Liyu (sarana dan prasarana serta SDM);

e. Pengembangan sentra perikanan di kawasan transmigrasi menjadi Desa Iwak

f. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) – Pelatihan alat berat, garmen serta tempat pemagangan dan sentra pelayanan jasa khususnya kebutuhan pemkab

g. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta pengembangan sentra IKM

h. Di bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan:

- Peningkatan sarana dan prasarana Peternakan (4.693 Ekor)
- Peningkatan Produktivitas Sayur dan Produktivitas Buah
- Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT)
- Pelayanan kesehatan Hewan
- Peningkatan Produktifitas Padi sawah (3,6 Ton/Ha)
- Peningkatan Produktifitas padi gogo (2,7 Ton/Ha)
- Peningkatan Produktifitas Jagung Hibrida (4.6 Ton/Ha)
- Hibah Sarana Perkebunan 85 UPPB / KT
- Rehabilitasi Perkebunan (Karet) 75 Ha
- Peningkatan kelas Kelompok Tani
- Pembinaan UPBB (23 UPBB/KT)

4. Prioritas 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan, dengan sasaran sebagai berikut :

a. Pemberian bantuan khusus bagi siswa yang tidak mampu/miskin agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi melalui program Kartu Balangan Pintar

b. Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi

- c. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan (rehabilitasi 8 SDN dan 2 SD Kecil, Pembangunan Laboratorium SMP)
  - d. Tunjangan Daerah bagi guru/pendidik
  - e. Fasilitasi kemudahan akses pendirian dan legalitas Yayasan Paud
  - f. Pengobatan gratis bagi warga Balangan yang diperluas, cukup menunjukkan KTP dan/atau KK Balangan
  - g. Rehabilitasi 5 puskesmas pembantu yang rusak berat (Pelajau, Kedondong, Inan, Muara Ninian, Hauwai)
  - h. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan serta bantuan khusus bagi ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
  - i. Pengembangan RSUD Balangan (APBD/APBN)
  - j. Pembangunan POSKESDES Desa Mamigang
  - k. Program Puskesmas Keliling
  - l. peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (pembangunan ruang perawatan puskesmas awayan)
5. Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Penyederhanaan SKPD dari 33 SKPD menjadi 22 SKPD (di luar kecamatan) tahun 2020.
  - b. Optimalisasi fungsi dan peran ASN sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme ASN.
  - c. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat
  - d. Implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh jabatan administrasi (eselon IV) di seluruh Perangkat Daerah
6. Prioritas 6 : Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif, dengan sasaran sebagai berikut :



## 1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan perangkat daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan perangkat daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan perangkat daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Daerah, Bappeda kabupaten Balangan telah merumuskan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Bappelitbangda, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan & inovasi Daerah, dengan Sasaran :
  1. Meningkatnya Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah
  2. Meningkatnya inovasi daerah

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda kabupaten Balangan dengan dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda kabupaten Balangan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Bappelitbangda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah akan mengawal secara langsung sesuai bidang/sector serta kewilayahan yang berada pada porsi yang sesuai dengan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi BAPPELITBANGDA. Sedangkan secara teknis berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah kabupaten Balangan, Bappelitbangda berkontribusi secara teknis



untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

**A. Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat Dan Abdi Negara**, mempunyai *tujuan* Meningkatkan kualitas perencanaan & inovasi daerah, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dengan indikator dan target yang ingin dicapai adalah :
  - a) **Nilai / predikat akuntabilitas kinerja** pada tahun 2021 sebesar 68 ; tahun 2022 sebesar 69 ; tahun 2023 sebesar 70 ; tahun 2024 sebesar 72 ; tahun 2025 sebesar 73 dan tahun 2026 mencapai 75. Perangkat daerah penanggung jawab : Bappelitbangda dan semua perangkat daerah .
  - b) **Persentase Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yg baik dan tepat waktu** dengan target masing-masing pada tahun 2021 sebesar 93,00 % ; tahun 2022 sebesar 94,00 % ; tahun 2023 sebesar 95,00 % ; tahun 2024 sebesar 96,00 % ; tahun 2025 sebesar 97,00% dan tahun 2026 mencapai 98,00 %. Penanggung jawab : Bappeda bidang perencanaan makro dan pengendalian.
  - c) **Persentase dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik dan tepat waktu (bidang ekonomi, Infrastruktur & kewilayahan)** masing-masing pada tahun 2021 sebesar 93,00 % ; tahun 2022 sebesar 94,00 % ; tahun 2023 sebesar 95,00 % ; tahun 2024 sebesar 96,00 % ; tahun 2025 sebesar 97,00% dan tahun 2026 mencapai 98,00 %. Penanggung jawab : Bappeda bidang ekonomi, infrastruktur & kewilayahan.
  - d) **Persentase dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik dan tepat waktu (bidang pemerintahan & pembangunan manusia)** masing-masing pada tahun 2021 sebesar 93,00 % ; tahun 2022 sebesar 94,00 % ; tahun 2023 sebesar 95,00 % ; tahun 2024 sebesar 96,00 % ; tahun 2025 sebesar 97,00% dan tahun 2026 mencapai 98,00 %. Penanggung jawab : Bappeda bidang pemerintahan & pembangunan manusia.

2. **Meningkatnya Inovasi Daerah, dengan indicator dan target yang ingin dicapai adalah :**

- a) Persentase penelitian dan pengembangan daerah yg dimanfaatkan dengan target masing-masing pada tahun 2021 sebesar 70,00 % ; tahun 2022 sebesar 75,00 % ; tahun 2023 sebesar 80,00 % ; tahun 2024 sebesar 85,00 % ; tahun 2025 sebesar 90,00% dan tahun 2026 mencapai 95,00 %.  
penanggung jawab : Bappelitbangda bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- b) Persentase inovasi daerah yg berkelanjutan dengan target masing-masing pada tahun 2021 sebesar 35 angka ; tahun 2022 sebesar 40 angka ; tahun 2023 sebesar 45 ; tahun 2024 sebesar 50 angka ; tahun 2025 sebesar 55 angka dan tahun 2026 mencapai 60 angka. penanggung jawab : Bappelitbangda bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

### 1.3 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri atas **Program dan Kegiatan** sebanyak **4 program** dan **16 kegiatan** yang meliputi :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan kegiatan*



- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - g) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
2. *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*
  - b) *Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*
  - c) *Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah*
3. *Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*
  - b) *Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*
  - c) *Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*
4. *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*
  - b) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*
  - c) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*
  - d) *Pengembangan Inovasi dan Teknologi*

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Adapun total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 berjumlah Rp. 14.396.976.765.00,- .Rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel TC.33 yang berisi program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif, sumber dana, beserta prakiraan maju (proyeksi) rencana tahun 2024.

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda kabupaten balangan 2023 berisi program, kegiatan dan subkegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten balangan. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja- PD)

Rencana kerja berupa Program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2023. Tahun 2023 bappelitbangda akan melaksanakan 4 program 16 kegiatan dan 58 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.396.976.765,-

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi perencanaan yang menjadi kewenangan Bappelitbangda dapat dilihat pada tabel 3.1.



**Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bappedalitbang Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	(2)						
					14,396,976,765		16,773,287,339
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	67	8,621,244,665	69	9,931,660,951
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	11 Dokumen	141,497,600	11 dokumen	182,147,350
	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja murni dan Renja Perubahan Bappedalitbang (dokumen)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 Dokumen	18,726,400	3 Dokumen	49,585,679
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappedalitbang (dokumen)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 Dokumen	39,030,000	4 dokumen	68,728,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah dokumenTersusunnya LKIP, LPPD, LKPJ Laporan e-Monev Bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 Dokumen	83,741,200	4 dokumen	63,833,671
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	5,704,974,015	100%	6,703,027,150
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	Kabupaten Balangan	12 bulan	5,630,888,415	12 bulan	6,609,191,820
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Balangan	12 bulan	56,787,000	12 bulan	73,501,401
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Bappedalitbang Kabupaten	2 Dokumen	8,809,000	2 dokumen	10,169,687
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappedalitbang Kabupaten	2 Dokumen	8,489,600	2 dokumen	10,164,242

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana	Bappedalitbang Kabupaten	100%	597,600,000	100%	169,642,000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Bappedalitbang Kabupaten	1 paket	30,000,000	75 stel	21,780,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM)	Bappedalitbang Kabupaten	12 bulan	567,600,000	12 bulan	147,862,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana	Bappedalitbang Kabupaten	100%	960,463,000	100%	706,797,058
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 paket	22,904,900	12 bulan	28,637,917
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 paket	486,085,400	12 bulan	254,281,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	84,921,000	12 bulan	67,605,241
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku serta peraturan-peraturan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	9,672,000	12 bulan	10,454,400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Tersedianya makanan dan minuman utk kegiatan tamu	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	356,879,700	12 bulan	345,818,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	60,000,000	1 paket	1,106,647,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perencanaan bangunan kantor bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	60,000,000	1 paket	1,106,647,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	813,996,000	12 bulan	694,677,093
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	199,442,200	12 bulan	237,160,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik, persentase ruangan /tempat kerja yg bersih Tersedianya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	614,553,800	12 bulan	457,517,093
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik daerah Bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	342,714,050	12 bulan	368,723,300



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	181,783,250	12 bulan	177,010,900
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten	100%	160,930,800	100%	191,712,400
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, provinsi, kabupaten)</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>98.8%</b>	<b>1,443,030,500</b>	<b>99%</b>	<b>3,576,620,608</b>
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	88%	1,088,428,000	90%	2,896,310,329
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 Dokumen	132,540,000	4 kegiatan	180,442,460
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappedalitbang Kabupaten	1 Berita Acara	40,852,000	1 dokumen	39,083,000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Berita Acara	197,850,000	1 dokumen	249,609,569
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Dokumen	717,186,000	2 dokumen	2,427,175,300
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase ketersediaan Data & Informasi perencanaan	Bappedalitbang Kabupaten	72%	174,600,000	74%	563,404,919
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	124,340,000	2 data	259,878,960
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kabupaten Balangan	1 Buku	50,260,000	2 buah	303,525,959
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah</b>	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	180,002,500	100%	116,905,360

	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Laporan	137,330,000	4 kegiatan	83,905,360
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8 Laporan	42,672,500	10 dokumen	33,000,000
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi &amp; infrastruktur dengan nilai baik</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>93.4%</b>	<b>2,229,293,700</b>	<b>94.2%</b>	<b>2,347,905,780</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakorpemerintahan & pembangunan manusia)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	46	1,151,638,700	46	1,051,768,300
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	439,155,000	2 bahan	373,618,960
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	244,157,700	32	155,860,100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	112,441,200	64	140,003,050
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	109,640,000	100%	94,864,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	49,756,800	2 dokumen	53,953,900

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan HasilAsistensi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	53,856,800	8 laporan	57,184,600
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan HasilPelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	34,847,200	16 laporan	45,215,280
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	107,784,000	100%	131,068,410
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaanSKPD dengan nilai baik u(gakor ekonomi &amp; SDA)</b>	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8 dokumen	546,873,600	8 dokumen	686,313,210
	Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan DaerahBidang Perekonomian(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah DokumenPerencanaanPembangun an DaerahBidang Perekonomianyang DikoordinirPenyusunannya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	143,393,800	2 bahan	125,791,600
	Asistensi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPerekonomian	Jumlah Laporan HasilAsistensi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPerekonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	30,570,400	4 dokumen	36,300,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat tDaerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumenpengendalian tahunberjalan dan monev tahun-2 SKPD subid ekonomi	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 dokumen	13,436,400	4 dokumen	15,730,000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah fasilitasforum/pokja/pemangkuke penitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	58,881,800	5 kegiatan	71,390,000
	Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan DaerahBidang SDA (RPJPD, RPJMDdan RKPD)	jumlah dokumenperencanaanpembangun an daerah(RPJMD dan RKPD) Bidangsumber daya alaman danlingkungan hidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 bahan	122,752,400	2 bahan	151,450,860

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan monev tahun-2 SKPD subid sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 dokumen	111,481,400	4 dokumen	188,516,790
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 dokumen	32,633,600	4 dokumen	47,484,030
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	33,723,800	5 kegiatan	49,649,930
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakor infrastruktur dn LH)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	530,781,400	1 dokumen	609,824,270
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPDP) Bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 bahan	115,618,000	2 bahan	146,290,210
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang diverifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	9 dokumen	9,426,000	6 dokumen	27,104,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen pengendalian tahun berjalan dan monev tahun n-2 SKPD) subid infrastruktur dan kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	25,821,600	4 dokumen	183,708,250
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan bidang kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	142,818,000	5 kegiatan	71,221,810
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	237,097,800	5 kegiatan	181,500,000

	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>60</b>	<b>2,103,407,900</b>	<b>65</b>	<b>917,100,000</b>
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg dimanfaatkan SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Laporan	318,520,800	2 dokumen	292,100,000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	179,220,000	1 dokumen	200,000,000
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	139,300,800	1 dokumen	92,100,000
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yg dimanfaatkan SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	10 dokumen	1,443,160,000	1 dokumen	350,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 dokumen	94,320,000	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	369,320,000	1 dokumen	350,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	94,320,000	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	104,220,000	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	254,960,000	-	-





## BAB IV

### PENUTUP

Hal - hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan dan penelitian pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.

Rencana Kerja (RENJA) Bappedalitbang Kabupaten Balangan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappedalitbang Kabupaten Balangan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappedalitbang Kabupaten Balangan





sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Renja Bappedalitbang Tahun 2023 setelah melalui proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya RKPD tersebut akan menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

Paringin, Agustus 2022

**Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Balangan,**



**H. Rakhmadi Yusni S.Sos, M.AP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19610514 198903 1 013**





Tabel TC. 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BAPPEDALITBANG TAHUN ANGGARAN 2023  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
BAPPEDALITBANG KAB BALANGAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Pegawai	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana pagu		
	(2)						Rp 14,396,976,765.00				Rp -	Rp 14,396,976,765.00				16,773,287,339
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	67	Rp -	Rp 8,621,244,665.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,621,244,665.00	APBD		69	9,931,660,951	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	11 Dokumen	Rp -	Rp 141,497,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 141,497,600.00	APBD		11 dokumen	182,147,350	
	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja murni dan Renja Perubahan Bappedalitbang (dokumen)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 Dokumen	Rp -	Rp 18,726,400.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18,726,400.00	APBD		3 Dokumen	49,585,679	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappedalitbang (dokumen)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 Dokumen	Rp -	Rp 39,030,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 39,030,000.00	APBD		4 dokumen	68,728,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danLkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah dokumenTersusunnya LKIP, LPPD, LKPJ Laporan e-Money Bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 Dokumen	Rp -	Rp 83,741,200.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83,741,200.00	APBD		4 dokumen	63,833,671	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp -	Rp 5,704,974,015.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,704,974,015.00	APBD		100%	6,703,027,150	
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp -	Rp 5,630,888,415.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,630,888,415.00	APBD		12 bulan	6,609,191,820	
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp -	Rp 56,787,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 56,787,000.00	APBD		12 bulan	73,501,401	
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Bappedalitbang Kabupaten	2 Dokumen	Rp -	Rp 8,809,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,809,000.00	APBD		2 dokumen	10,169,687	
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/ SemesteranSKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappedalitbang Kabupaten	2 Dokumen	Rp -	Rp 8,489,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,489,600.00	APBD		2 dokumen	10,164,242	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana	Bappedalitbang Kabupaten	100%	Rp -	Rp 597,600,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 597,600,000.00	APBD		100%	169,642,000	
	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Bappedalitbang Kabupaten	1 paket	Rp -	Rp 30,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30,000,000.00	APBD		75 stell	21,780,000	
	Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM)	Bappedalitbang Kabupaten	12 bulan	Rp -	Rp 567,600,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 567,600,000.00	APBD		12 bulan	147,862,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana	Bappedalitbang Kabupaten	100%	Rp -	Rp 960,463,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 960,463,000.00	APBD		100%	706,797,058	
	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 paket	Rp -	Rp 22,904,900.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22,904,900.00	APBD		12 bulan	28,637,917	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 paket	Rp -	Rp 486,085,400.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 486,085,400.00	APBD		12 bulan	254,281,500	
	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp -	Rp 84,921,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 84,921,000.00	APBD		12 bulan	67,605,241	
	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku serta peraturan-peraturan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp -	Rp 9,672,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9,672,000.00	APBD		12 bulan	10,454,400	


	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Tersedianya makanan dan minuman utk kegiatan tamu	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp	-	Rp	356,879,700.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	356,879,700.00	APBD	12 bulan	345,818,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhiya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp	-	Rp	60,000,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	60,000,000.00	APBD	1 paket	1,106,647,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perencanaan bangunan kantor bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp	-	Rp	60,000,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	60,000,000.00	APBD	1 paket	1,106,647,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp	-	Rp	813,996,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	813,996,000.00	APBD	12 bulan	694,677,093
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp	-	Rp	199,442,200.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	199,442,200.00	APBD	12 bulan	237,160,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik, persentase ruangan /tempat kerja yg bersih Tersedianya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp	-	Rp	614,553,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	614,553,800.00	APBD	12 bulan	457,517,093
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik daerah Bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp	-	Rp	342,714,050.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	342,714,050.00	APBD	12 bulan	368,723,300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp	-	Rp	181,783,250.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	181,783,250.00	APBD	12 bulan	177,010,900
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Baneuan Lainnya	persentase Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten	100%	Rp	-	Rp	160,930,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	160,930,800.00	APBD	100%	191,712,400
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, provinsi, kabupaten)</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>98.8%</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>1,443,030,500.00</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>1,443,030,500.00</b>	<b>APBD</b>	<b>99%</b>	<b>3,576,620,608</b>
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	88%	Rp	-	Rp	1,088,428,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1,088,428,000.00	APBD	90%	2,896,310,329
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 Dokumen	Rp	-	Rp	132,540,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	132,540,000.00	APBD	4 kegiatan	180,442,460
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappedalitbang Kabupaten	1 Berita Acara	Rp	-	Rp	40,852,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	40,852,000.00	APBD	1 dokumen	39,083,000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Berita Acara	Rp	-	Rp	197,850,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	197,850,000.00	APBD	1 dokumen	249,609,569
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Dokumen	Rp	-	Rp	717,186,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	717,186,000.00	APBD	2 dokumen	2,427,175,300
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase ketersediaan Data & Informasi perencanaan	Bappedalitbang Kabupaten	72%	Rp	-	Rp	174,600,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	174,600,000.00	APBD	74%	563,404,919
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp	-	Rp	124,340,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	124,340,000.00	APBD	2 data	259,878,960
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kabupaten Balangan	1 Buku	Rp	-	Rp	50,260,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	50,260,000.00	APBD	2 buah	303,525,959
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah</b>	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp	-	Rp	180,002,500.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	180,002,500.00	APBD	100%	116,905,360

	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Laporan	Rp	-	Rp	137,330,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	137,330,000.00	APBD	4 kegiatan	83,905,360
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8 Laporan	Rp	-	Rp	42,672,500.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	42,672,500.00	APBD	10 dokumen	33,000,000
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi &amp; infrastruktur dengan nilai baik</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>93.4%</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>2,229,293,700.00</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>2,229,293,700.00</b>	<b>APBD</b>	<b>94.2%</b>	<b>2,347,905,780</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakor pemerintahan & pembangunan manusia)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	46	Rp	-	Rp	1,151,638,700.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1,151,638,700.00	APBD	46	1,051,768,300
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp	-	Rp	439,155,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	439,155,000.00	APBD	2 bahan	373,618,960
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp	-	Rp	244,157,700.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	244,157,700.00	APBD	32	155,860,100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp	-	Rp	112,441,200.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	112,441,200.00	APBD	64	140,003,050
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp	-	Rp	109,640,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	109,640,000.00	APBD	100%	94,864,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp	-	Rp	49,756,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	49,756,800.00	APBD	2 dokumen	53,953,900
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp	-	Rp	53,856,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	53,856,800.00	APBD	8 laporan	57,184,600
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp	-	Rp	34,847,200.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	34,847,200.00	APBD	16 laporan	45,215,280
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp	-	Rp	107,784,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	107,784,000.00	APBD	100%	131,068,410
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakor ekonomi &amp; SDA)</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>546,873,600.00</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>546,873,600.00</b>	<b>APBD</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>686,313,210</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp	-	Rp	143,393,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	143,393,800.00	APBD	2 bahan	125,791,600

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp	-	Rp	30,570,400.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	30,570,400.00	APBD	4 dokumen	36,300,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan move tahun-2 SKPD subid ekonomi	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 dokumen	Rp	-	Rp	13,436,400.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	13,436,400.00	APBD	4 dokumen	15,730,000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah fasilitas forum/pokja/pemangkuke penitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	Rp	-	Rp	58,881,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	58,881,800.00	APBD	5 kegiatan	71,390,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 bahan	Rp	-	Rp	122,752,400.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	122,752,400.00	APBD	2 bahan	151,450,860
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan move tahun-2 SKPD subid sumber daya alam dan lingkungan hidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 dokumen	Rp	-	Rp	111,481,400.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	111,481,400.00	APBD	4 dokumen	188,516,790
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah fasilitas forum/pokja/pemangkuke penitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 dokumen	Rp	-	Rp	32,633,600.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	32,633,600.00	APBD	4 dokumen	47,484,030
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah fasilitas forum/pokja/pemangkuke penitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	Rp	-	Rp	33,723,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	33,723,800.00	APBD	5 kegiatan	49,649,930
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakor infrastruktur dn LH)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp	-	Rp	530,781,400.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	530,781,400.00	APBD	1 dokumen	609,824,270
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 bahan	Rp	-	Rp	115,618,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	115,618,000.00	APBD	2 bahan	146,290,210
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang diverifikasi subid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	9 dokumen	Rp	-	Rp	9,426,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	9,426,000.00	APBD	6 dokumen	27,104,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen pengendalian tahun berjalan dan move tahun n-2 SKPD) subid infrastruktur dan kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	Rp	-	Rp	25,821,600.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	25,821,600.00	APBD	4 dokumen	183,708,250
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah fasilitas forum/pokja/pemangkuke penitngan bidang kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	Rp	-	Rp	142,818,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	142,818,000.00	APBD	5 kegiatan	71,221,810
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp	-	Rp	237,097,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	237,097,800.00	APBD	5 kegiatan	181,500,000
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>60</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>2,103,407,900.00</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>2,103,407,900.00</b>	<b>APBD</b>	<b>65</b>	<b>917,100,000</b>

	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg dimanfaatkan SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Laporan	Rp	-	Rp	318,520,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	318,520,800.00	APBD	2 dokumen	292,100,000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp	-	Rp	179,220,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	179,220,000.00	APBD	1 dokumen	200,000,000
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp	-	Rp	139,300,800.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	139,300,800.00	APBD	1 dokumen	92,100,000
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yg dimanfaatkan SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	10 dokumen	Rp	-	Rp	1,443,160,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1,443,160,000.00	APBD	1 dokumen	350,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 dokumen	Rp	-	Rp	94,320,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	94,320,000.00	APBD	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp	-	Rp	369,320,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	369,320,000.00	APBD	1 dokumen	350,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp	-	Rp	94,320,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	94,320,000.00	APBD	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp	-	Rp	104,220,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	104,220,000.00	APBD	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp	-	Rp	254,960,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	254,960,000.00	APBD	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp	-	Rp	94,320,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	94,320,000.00	APBD	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 dokumen	Rp	-	Rp	431,700,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	431,700,000.00	APBD	-	-
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah inovasi dan teknologi yg di jaring	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp	-	Rp	341,727,100.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	341,727,100.00	APBD	1 laporan	275,000,000
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp	-	Rp	341,727,100.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	341,727,100.00	APBD	1 laporan	275,000,000

Kepala Bappedalitbang,

  
**H. Rakhmad Yusni, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19701207 199503 1 002





**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BAPPEDALITBANG TAHUN ANGGARAN 2023  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
BAPPEDALITBANG KAB BALANGAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu
	(2)				Rp 14,396,976,765.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14,396,976,765.00				16,773,287,339
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	67	Rp 8,621,244,665.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,621,244,665.00	APBD		69	9,931,660,951
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	11 Dokumen	Rp 141,497,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 141,497,600.00	APBD		11 dokumen	182,147,350
	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja murni dan Renja Perubahan Bappedalitbang (dokumen)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 Dokumen	Rp 18,726,400.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18,726,400.00	APBD		3 Dokumen	49,585,679
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappedalitbang (dokumen)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 Dokumen	Rp 39,030,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 39,030,000.00	APBD		4 dokumen	68,728,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danlntisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah dokumenTersusunnya LKIP, LPPD, LKPJ Laporan e-Monev Bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 Dokumen	Rp 83,741,200.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83,741,200.00	APBD		4 dokumen	63,833,671
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 5,704,974,015.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,704,974,015.00	APBD		100%	6,703,027,150
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 5,630,888,415.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,630,888,415.00	APBD		12 bulan	6,609,191,820
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 56,787,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 56,787,000.00	APBD		12 bulan	73,501,401
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Bappedalitbang Kabupaten	2 Dokumen	Rp 8,809,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,809,000.00	APBD		2 dokumen	10,169,687
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappedalitbang Kabupaten	2 Dokumen	Rp 8,489,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,489,600.00	APBD		2 dokumen	10,164,242
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi,sarana & prasarana	Bappedalitbang Kabupaten	100%	Rp 597,600,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 597,600,000.00	APBD		100%	169,642,000
	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Bappedalitbang Kabupaten	1 paket	Rp 30,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30,000,000.00	APBD		75 stell	21,780,000
	Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM)	Bappedalitbang Kabupaten	12 bulan	Rp 567,600,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 567,600,000.00	APBD		12 bulan	147,862,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi,sarana & prasarana	Bappedalitbang Kabupaten	100%	Rp 960,463,000.00				Rp 960,463,000.00	APBD		100%	706,797,058
	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 paket	Rp 22,904,900.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22,904,900.00	APBD		12 bulan	28,637,917
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 paket	Rp 486,085,400.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 486,085,400.00	APBD		12 bulan	254,281,500
	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 84,921,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 84,921,000.00	APBD		12 bulan	67,605,241
	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku serta peraturan-peraturan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 9,672,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9,672,000.00	APBD		12 bulan	10,454,400

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Tersedianya makanan dan minuman utk kegiatan tamu	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 356,879,700.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 356,879,700.00	APBD	12 bulan	345,818,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 60,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60,000,000.00	APBD	1 paket	1,106,647,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perencanaan bangunan kantor bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 60,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60,000,000.00	APBD	1 paket	1,106,647,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 813,996,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 813,996,000.00	APBD	12 bulan	694,677,093
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 199,442,200.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 199,442,200.00	APBD	12 bulan	237,160,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik, persentase ruangan /tempat kerja yg bersih/tersedianya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 614,553,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 614,553,800.00	APBD	12 bulan	457,517,093
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik daerah Bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 342,714,050.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 342,714,050.00	APBD	12 bulan	368,723,300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 181,783,250.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 181,783,250.00	APBD	12 bulan	177,010,900
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 160,930,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 160,930,800.00	APBD	100%	191,712,400
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, provinsi, kabupaten)</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>98.8%</b>	<b>Rp 1,443,030,500.00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1,443,030,500.00</b>	<b>APBD</b>	<b>99%</b>	<b>3,576,620,608</b>
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	88%	Rp 1,088,428,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,088,428,000.00	APBD	90%	2,896,310,329
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/ Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 Dokumen	Rp 132,540,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 132,540,000.00	APBD	4 kegiatan	180,442,460
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Berita Acara	Rp 40,852,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 40,852,000.00	APBD	1 dokumen	39,083,000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Berita Acara	Rp 197,850,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 197,850,000.00	APBD	1 dokumen	249,609,569
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Dokumen	Rp 717,186,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 717,186,000.00	APBD	2 dokumen	2,427,175,300
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase ketersediaan Data & Informasi perencanaan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	72%	Rp 174,600,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 174,600,000.00	APBD	74%	563,404,919
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp 124,340,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 124,340,000.00	APBD	2 data	259,878,960
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kabupaten Balangan	1 Buku	Rp 50,260,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50,260,000.00	APBD	2 buah	303,525,959


	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah</b>	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 180,002,500.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 180,002,500.00	APBD	100%	116,905,360
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Laporan	Rp 137,330,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 137,330,000.00	APBD	4 kegiatan	83,905,360
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8 Laporan	Rp 42,672,500.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 42,672,500.00	APBD	10 dokumen	33,000,000
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi &amp; infrastruktur dengan nilai baik</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>93.4%</b>	<b>Rp 2,229,293,700.00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2,229,293,700.00</b>	<b>APBD</b>	<b>94.2%</b>	<b>2,347,905,780</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakor pemerintahan & pembangunan manusia)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	46	Rp 1,151,638,700.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,151,638,700.00	APBD	46	1,051,768,300
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir/ Penyusunannya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp 439,155,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 439,155,000.00	APBD	2 bahan	373,618,960
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 244,157,700.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 244,157,700.00	APBD	32	155,860,100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 112,441,200.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 112,441,200.00	APBD	64	140,003,050
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 109,640,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 109,640,000.00	APBD	100%	94,864,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp 49,756,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 49,756,800.00	APBD	2 dokumen	53,953,900
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 53,856,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 53,856,800.00	APBD	8 laporan	57,184,600
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 34,847,200.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 34,847,200.00	APBD	16 laporan	45,215,280
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 107,784,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 107,784,000.00	APBD	100%	131,068,410
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik u(gakor ekonomi &amp; SDA)</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>Rp 546,873,600.00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 546,873,600.00</b>	<b>APBD</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>686,313,210</b>

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp 143,393,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	143,393,800.00	APBD		2 bahan	125,791,600
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp 30,570,400.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	30,570,400.00	APBD		4 dokumen	36,300,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan movev tahun-2 SKPD subid ekonomi	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 dokumen	Rp 13,436,400.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	13,436,400.00	APBD		4 dokumen	15,730,000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangkuke penitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	Rp 58,881,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	58,881,800.00	APBD		5 kegiatan	71,390,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 bahan	Rp 122,752,400.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	122,752,400.00	APBD		2 bahan	151,450,860
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen pengendalian tahun berjalan dan movev tahun-2 SKPD subid sumber daya alam dan lingkungan hidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 dokumen	Rp 111,481,400.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	111,481,400.00	APBD		4 dokumen	188,516,790
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangkuke penitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 dokumen	Rp 32,633,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	32,633,600.00	APBD		4 dokumen	47,484,030
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangkuke penitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	Rp 33,723,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	33,723,800.00	APBD		5 kegiatan	49,649,930
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakor infrastruktur dan LH)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp 530,781,400.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	530,781,400.00	APBD		1 dokumen	609,824,270
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 bahan	Rp 115,618,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	115,618,000.00	APBD		2 bahan	146,290,210
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang diverifikasi subid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	9 dokumen	Rp 9,426,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	9,426,000.00	APBD		6 dokumen	27,104,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen pengendalian tahun berjalan dan movev tahun n-2 SKPD) subid infrastruktur dan kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	Rp 25,821,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	25,821,600.00	APBD		4 dokumen	183,708,250
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangkuke penting bidang kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	5 kegiatan	Rp 142,818,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	142,818,000.00	APBD		5 kegiatan	71,221,810

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang Kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp 237,097,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 237,097,800.00	APBD	5 kegiatan	181,500,000
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Bappedalitbang Kabupaten Balangan</b>	<b>60</b>	<b>Rp 2,103,407,900.00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2,103,407,900.00</b>	<b>APBD</b>	<b>65</b>	<b>917,100,000</b>
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg dimanfaatkan SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Laporan	Rp 318,520,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 318,520,800.00	APBD	2 dokumen	292,100,000
	Fasilitasi, Pelaksanaan danEvaluasi Penelitian danPengembangan BidangPemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp 179,220,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 179,220,000.00	APBD	1 dokumen	200,000,000
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp 139,300,800.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 139,300,800.00	APBD	1 dokumen	92,100,000
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yg dimanfaatkan SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	10 dokumen	Rp 1,443,160,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,443,160,000.00	APBD	1 dokumen	350,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan BadanUsaha Mifik Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 dokumen	Rp 94,320,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 94,320,000.00	APBD	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan Pertanian,Perkebunan dan Pangan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp 369,320,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 369,320,000.00	APBD	1 dokumen	350,000,000
	Penelitian danPengembangan Kelautandan Perikanan	Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan Kelautandan Perikanan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp 94,320,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 94,320,000.00	APBD	-	-
	Penelitian danPengembangan LingkunganHidup	Jumlah Dokumen Hasi Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp 104,220,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 104,220,000.00	APBD	-	-
	Penelitian danPengembangan PekerjaanUmum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Pekerjaan Umum	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp 254,960,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 254,960,000.00	APBD	-	-
	Penelitian danPengembanganPerhubungan	Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembanganPerhubungan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dokumen	Rp 94,320,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 94,320,000.00	APBD	-	-
	Penelitian danPengembangan PenataanRuang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan PenataanRuang dan Pertanahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 dokumen	Rp 431,700,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 431,700,000.00	APBD	-	-
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah inovasi dan teknologi yg dijarah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 341,727,100.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 341,727,100.00	APBD	1 laporan	275,000,000

	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp 341,727,100.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 341,727,100.00	APBD		1 laporan	275,000,000

Kepala Bappedalitbang,

  
**H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP**  
 NIP. 19701207 199503 1 002